ISSN 2621- 458X

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES): ANALISIS KUALITATIF DENGAN NVIVO 12 PRO

Rasidin Calundu
ITBA Al Gazali Barru
rasidincalundu564@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami bentuk keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, proses penentuan prioritas pembangunan, serta faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi dengan tujuh informan yang terdiri atas unsur pemerintah desa dan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan bantuan NVivo 12 Pro melalui proses pengodean, pengelompokan kategori, dan identifikasi tema-tema utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berlangsung melalui penyampaian aspirasi, pemberian usulan pembangunan, dan keterlibatan dalam forum Musrenbangdes. Aspirasi masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan, meskipun tingkat keterlibatan masyarakat masih dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, pemahaman mengenai proses perencanaan, dan keterwakilan peserta dalam forum. Faktor pendukung partisipasi meliputi keterbukaan pemerintah desa, komunikasi, dan kesempatan menyampaikan aspirasi. Penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan akses informasi, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat agar proses perencanaan pembangunan desa berlangsung secara lebih inklusif dan responsif.

Kata kunci: partisipasi masyarakat; Musrenbangdes; perencanaan pembangunan desa; aspirasi masyarakat; NVivo

A.PENDAHULUAN

lisensi CC BY

Pembangunan desa merupakan proses yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebutuhan

dan arah pembangunan. Masyarakat merupakan pihak yang memahami secara langsung berbagai persoalan dan kebutuhan di tingkat lokal sehingga keterlibatan mereka menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, mengidentifikasi kebutuhan, serta memberikan masukan terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan. Penelitian mengenai perencanaan pembangunan desa menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat diperlukan agar proses perencanaan dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara lebih nyata (Nadhiro & Choiriyah, 2024). Selain itu, pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa dapat meningkatkan ruang keterlibatan masyarakat dalam menentukan agenda pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Nuraedah et al., 2025).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan salah satu mekanisme formal yang menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan. Forum ini mempertemukan pemerintah desa, unsur masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas kebutuhan serta prioritas pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, Musrenbangdes tidak hanya berfungsi sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa proses Musrenbangdes dapat menjadi sarana untuk mengakomodasi usulan masyarakat dalam penyusunan prioritas pembangunan desa (Tupen et al., 2025). Penelitian lain menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa yang menerapkan prinsip good governance membutuhkan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian aturan dalam proses pengambilan keputusan (Athaya et al., 2024).

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes tidak dapat hanya dilihat dari jumlah masyarakat yang menghadiri forum. Partisipasi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, mengajukan usulan, memberikan informasi mengenai kebutuhan masyarakat, serta ikut membahas prioritas pembangunan. Dalam konteks participatory village governance, masyarakat dapat terlibat melalui berbagai mekanisme pertemuan dan ruang komunikasi dalam proses pembangunan desa (Syukri, 2023). Partisipasi yang demikian memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi aktor yang memberikan kontribusi dalam menentukan arah pembangunan. Penelitian mengenai peningkatan partisipasi masyarakat juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan pendidikan masyarakat dapat menjadi instrumen untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa (Nuraedah et al., 2025).

Meskipun partisipasi masyarakat telah menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan desa, pelaksanaannya belum selalu berlangsung secara optimal. Salah satu persoalan yang muncul adalah adanya keterbatasan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian mengenai Musrenbangdes menunjukkan bahwa masyarakat dapat hadir dalam forum, tetapi tingkat keterlibatan mereka dalam menyampaikan pendapat dan memengaruhi keputusan masih berbeda-beda (Hadawiya, 2021). Penelitian yang lebih baru juga

menunjukkan adanya perbedaan antara mekanisme partisipasi formal dan informal dalam perencanaan pembangunan desa. Forum formal seperti Musrenbangdes dapat melibatkan perwakilan masyarakat, sedangkan forum informal dapat memberikan ruang komunikasi yang berbeda dalam menyampaikan aspirasi masyarakat (Syifana et al., 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan forum Musrenbangdes secara formal belum secara otomatis menjamin keterlibatan seluruh masyarakat secara aktif.

Faktor informasi, pemahaman, dan kesempatan berkomunikasi juga berpengaruh terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Masyarakat yang memperoleh informasi mengenai agenda, tujuan, dan mekanisme Musrenbangdes memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mempersiapkan usulan dan menyampaikan kebutuhan mereka. Sebaliknya, keterbatasan informasi dan pemahaman dapat menyebabkan masyarakat menjadi pasif dalam forum perencanaan. Penelitian mengenai strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyediakan informasi dan menciptakan ruang komunikasi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan (Sihaloho et al., 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi tidak hanya bergantung pada kemauan masyarakat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan kondisi yang mendukung keterlibatan masyarakat.

Selain keterlibatan dalam menyampaikan aspirasi, aspek penting lainnya adalah bagaimana usulan masyarakat dipertimbangkan dalam menentukan prioritas pembangunan. Tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan karena pemerintah desa perlu mempertimbangkan kebutuhan yang paling mendesak, kemampuan anggaran, kewenangan desa, serta prioritas pembangunan. Oleh sebab itu, respons pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dari proses partisipasi. Penelitian Athaya et al. (2024) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat perlu berjalan bersama transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan desa. Penelitian Tupen et al. (2025) juga menunjukkan bahwa Musrenbangdes memiliki peran dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat perlu dipahami tidak hanya dari proses penyampaian aspirasi, tetapi juga dari bagaimana aspirasi tersebut dipertimbangkan dan ditindaklanjuti dalam proses perencanaan.

Dalam konteks lokal Sulawesi Selatan, penelitian mengenai Musrenbangdes menunjukkan bahwa efektivitas partisipasi masyarakat masih menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Penelitian Nasir (2026) mengenai Musrenbangdes di Desa Bulogading, Kabupaten Gowa, menunjukkan bahwa forum Musrenbangdes digunakan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan, tetapi efektivitas partisipasi masih dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dan proses pelaksanaan forum. Sementara itu, penelitian di Desa Kelong, Kabupaten Bintan, menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes dapat berjalan sesuai prosedur, tetapi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih menghadapi berbagai keterbatasan (Oktafiana et al., 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik

partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh karakteristik lokal, termasuk pola komunikasi, kapasitas pemerintah desa, pemahaman masyarakat, dan mekanisme penyampaian aspirasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada "Community Participation in Development Planning Forums (Musrenbangdes): A Qualitative Exploration through NVivo" di Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana proses Musrenbangdes dilaksanakan, bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan, sejauh mana aspirasi tersebut dipertimbangkan dalam penentuan prioritas, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan NVivo untuk mengorganisasikan, mengodekan, dan mengidentifikasi pola serta tema dari data wawancara. Penggunaan NVivo memungkinkan peneliti mengidentifikasi keterkaitan antara tema *community participation*, *community voice*, *decision-making*, *government responsiveness*, *participation barriers*, *supporting factors*, dan *participation improvement*. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris mengenai praktik partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes serta memperkaya kajian mengenai perencanaan pembangunan desa berbasis partisipasi.

B.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap pengalaman, pandangan, bentuk keterlibatan, serta proses masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan memengaruhi penentuan prioritas pembangunan desa. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai fenomena partisipasi dalam konteks sosial dan pemerintahan desa secara alamiah. Penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan purposive sampling juga telah digunakan dalam penelitian mengenai partisipasi masyarakat pada konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Utami & Machdum, 2021).

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan yang relevan dengan pelaksanaan Musrenbangdes. Informan terdiri atas tujuh orang yang mencakup Kepala Desa Harapan, Sekretaris Desa, staf kantor desa, dan masyarakat Desa Harapan. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan menggunakan lima pertanyaan utama yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbangdes, penyampaian aspirasi masyarakat, pertimbangan aspirasi dalam penetapan prioritas pembangunan, faktor pendukung dan penghambat partisipasi, serta upaya peningkatan partisipasi. Selain wawancara, penelitian menggunakan observasi dan dokumentasi sebagai data pendukung untuk memperkuat informasi yang diperoleh dari informan.

Analisis data dilakukan secara sistematis dengan bantuan NVivo 12 Pro untuk mengorganisasi, mengode, dan mengidentifikasi pola dari data hasil wawancara. Tahapan analisis meliputi pengumpulan dan transkripsi data, pembacaan data secara menyeluruh, pemberian kode, pengelompokan kode ke dalam kategori, serta pembentukan tema yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kode-kode yang dikembangkan meliputi Community Participation, Community Voice, Decision-Making, Government Responsiveness, Participation Barriers, Supporting Factors, Participation Outcomes, dan Participation Improvement. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari unsur pemerintah desa dan masyarakat serta melakukan pengecekan kembali terhadap kesesuaian interpretasi data. Hasil pengodean NVivo kemudian digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang menjelaskan pola partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbangdes.

Gambar 1 Kerangka Pikir Eksplorasi Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes - Alur Penelitian Kualitatif dengan NVivo

Gambar di atas menampilkan visualisasi kerangka pikir penelitian kualitatif berjudul "Eksplorasi Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes" dengan menggunakan pendekatan perangkat lunak NVivo yang dirancang secara warna-warni. Kerangka kerja ini tersusun secara vertikal dari atas ke bawah melalui lima tahapan utama, mulai dari tahap Input (regulasi dan profil demografi), Proses Utama (pelaksanaan Musrenbangdes dan interaksi sosial), Metodologi Analisis (pengkodean dan pemetaan data menggunakan NVivo), Output (temuan tematik dan hambatan partisipasi), hingga bermuara pada Outcome berupa dampak jangka panjang terhadap akuntabilitas dan efektivitas pembangunan desa.

C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- Hasil Penelitian

Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, menunjukkan adanya ruang formal bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Harapan, Syakariah, S.Sos., Musrenbangdes dilaksanakan sebagai forum untuk menghimpun kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Informasi mengenai kegiatan disampaikan kepada unsur masyarakat yang dianggap berkepentingan dalam proses perencanaan. Sekretaris Desa, Sultan, S.Sos., menjelaskan bahwa pelaksanaan forum melibatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam pembahasan kebutuhan pembangunan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa Musrenbangdes tidak hanya menjadi forum administratif pemerintah desa. Masyarakat diberikan kesempatan untuk hadir dan menyampaikan kebutuhan yang dianggap penting. Temuan ini menunjukkan adanya mekanisme partisipasi langsung dalam perencanaan pembangunan Desa Harapan.

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes terlihat melalui kehadiran, penyampaian pendapat, dan pengajuan usulan pembangunan. Sartika sebagai staf Kantor Desa Harapan menjelaskan bahwa masyarakat yang mengikuti forum diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan yang terdapat di lingkungan masing-masing. Hikmah juga menyampaikan bahwa masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap rencana pembangunan yang dibahas dalam musyawarah. Dengan demikian, partisipasi tidak hanya berbentuk kehadiran secara fisik, tetapi juga keterlibatan dalam proses komunikasi dan penyampaian aspirasi. Namun, tingkat keaktifan masyarakat dalam menyampaikan pendapat tidak selalu sama. Sebagian masyarakat lebih aktif mengemukakan kebutuhan, sementara sebagian lainnya cenderung mendengarkan proses pembahasan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya variasi intensitas partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangdes.

Dari sisi masyarakat, pengalaman mengikuti Musrenbangdes menunjukkan bahwa forum tersebut menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan. Sultan, sebagai masyarakat Desa Harapan, menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan berbagai kebutuhan yang dianggap penting bagi lingkungan mereka. Nasrah Kasim juga mengungkapkan bahwa kesempatan menyampaikan aspirasi menjadi bagian penting dari keterlibatan masyarakat dalam perencanaan desa. Aspirasi masyarakat dapat berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur, pelayanan masyarakat, kegiatan sosial, maupun kebutuhan ekonomi. Rahmat Wijaya menilai bahwa masyarakat dapat menyampaikan kondisi dan kebutuhan yang mereka temui secara langsung kepada pemerintah desa. Hal tersebut memperlihatkan adanya komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah desa. Dengan demikian, Musrenbangdes berfungsi sebagai ruang artikulasi kebutuhan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat belum secara otomatis menjadikan seluruh usulan sebagai program pembangunan. Syakariah, S.Sos., menjelaskan bahwa pemerintah desa perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan usulan menjadi prioritas pembangunan. Pertimbangan tersebut meliputi tingkat kebutuhan, urgensi pembangunan, kemampuan anggaran, serta kesesuaian dengan perencanaan desa. Sultan, S.Sos., sebagai Sekretaris Desa, menjelaskan bahwa usulan masyarakat terlebih dahulu dibahas dalam forum sebelum ditentukan prioritasnya. Oleh karena itu, terdapat proses seleksi dan pembahasan terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan. Usulan yang belum menjadi prioritas tidak selalu berarti tidak diperhatikan oleh pemerintah desa. Beberapa usulan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan pada periode berikutnya.

Dalam perspektif partisipasi, temuan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk memengaruhi agenda pembangunan melalui penyampaian aspirasi. Sartika menjelaskan bahwa usulan yang disampaikan masyarakat dicatat dan menjadi bagian dari bahan pembahasan perencanaan desa. Hikmah juga menunjukkan bahwa proses musyawarah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai kebutuhan dan prioritas pembangunan. Dari sisi masyarakat, Sultan menyatakan bahwa keberadaan forum Musrenbangdes memberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung. Nasrah Kasim menekankan pentingnya kesempatan tersebut karena masyarakat lebih mengetahui kondisi kebutuhan di lingkungan mereka. Dengan demikian, partisipasi masyarakat berlangsung melalui proses penyampaian informasi, aspirasi, dan pendapat. Temuan ini memperlihatkan adanya hubungan antara suara masyarakat dan proses penentuan agenda pembangunan desa.

Meskipun terdapat ruang partisipasi, penelitian menunjukkan adanya beberapa hambatan dalam keterlibatan masyarakat. Berdasarkan keterangan pemerintah desa, salah satu hambatan adalah kesibukan masyarakat dengan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Sartika menjelaskan bahwa kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan sebagian masyarakat untuk menghadiri kegiatan Musrenbangdes. Hikmah menambahkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang sama mengenai fungsi dan pentingnya Musrenbangdes. Dari perspektif masyarakat, Rahmat Wijaya menyatakan bahwa informasi mengenai kegiatan dan pentingnya keterlibatan masyarakat perlu terus diperkuat. Nasrah Kasim juga menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan informasi yang jelas agar dapat mempersiapkan usulan sebelum forum berlangsung. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi dipengaruhi oleh faktor waktu, informasi, dan pemahaman masyarakat.

Faktor pendukung partisipasi masyarakat terutama berkaitan dengan keterbukaan pemerintah desa dan adanya kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Syakariah, S.Sos., menjelaskan bahwa pemerintah desa berupaya membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan pendapat. Sultan, S.Sos., menyampaikan bahwa penyampaian informasi mengenai kegiatan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan masyarakat mengikuti forum. Sartika dan Hikmah juga menunjukkan pentingnya komunikasi antara

pemerintah desa dengan masyarakat dalam proses perencanaan. Dari kelompok masyarakat, Sultan menilai bahwa kesempatan berbicara secara langsung dapat mendorong masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan mereka. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap informasi dan ruang komunikasi menjadi unsur penting dalam membangun partisipasi. Dengan demikian, keterbukaan dan komunikasi menjadi faktor yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes.

Analisis tematik melalui NVivo memperlihatkan keterkaitan antara beberapa tema utama dalam data wawancara. Tema Community Participation berkaitan dengan kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam forum Musrenbangdes. Tema Community Voice muncul melalui pernyataan mengenai penyampaian aspirasi, pendapat, dan usulan pembangunan. Tema Decision-Making berkaitan dengan proses pembahasan dan penentuan prioritas pembangunan berdasarkan usulan yang disampaikan. Sementara itu, Government Responsiveness terlihat dari pembahasan mengenai respons pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat. Tema Participation Barriers muncul melalui faktor kesibukan, keterbatasan informasi, dan pemahaman masyarakat. Adapun Supporting Factors berkaitan dengan keterbukaan pemerintah, komunikasi, dan kesempatan menyampaikan pendapat. Hasil coding tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses yang berkaitan antara suara masyarakat, respons pemerintah, dan pengambilan keputusan pembangunan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Harapan berlangsung melalui kehadiran, penyampaian aspirasi, pemberian pendapat, dan keterlibatan dalam pembahasan kebutuhan pembangunan. Syakariah, S.Sos., Sultan, S.Sos., Sartika, dan Hikmah memberikan gambaran mengenai mekanisme dan respons pemerintah desa terhadap keterlibatan masyarakat. Sementara itu, Sultan, Nasrah Kasim, dan Rahmat Wijaya memberikan gambaran mengenai pengalaman masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan dan mengikuti proses perencanaan. Temuan menunjukkan bahwa Musrenbangdes menyediakan ruang formal bagi masyarakat untuk menyampaikan suara dalam pembangunan desa. Namun, tingkat keterlibatan masyarakat masih dipengaruhi oleh kesibukan, akses informasi, dan pemahaman mengenai fungsi forum. Karena itu, penguatan sosialisasi, keterbukaan informasi, dan kesempatan menyampaikan pendapat menjadi bagian penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Temuan tersebut menegaskan bahwa partisipasi dalam Musrenbangdes merupakan proses interaksi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam membentuk agenda pembangunan.

- Analisis Data Menggunakan NVivo

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang didukung oleh perangkat lunak NVivo 12 Pro. Penggunaan NVivo bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengelola, mengorganisasikan, melakukan pengodean, dan menganalisis data kualitatif secara sistematis mengenai partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan desa

(Musrenbangdes) di Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan yang terdiri atas Kepala Desa Harapan, Sekretaris Desa, staf kantor desa, dan masyarakat Desa Harapan. Informan tersebut dipilih karena memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai proses perencanaan pembangunan desa serta keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes. Untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap temuan penelitian, data wawancara dapat didukung dengan hasil observasi lapangan dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbangdes, seperti dokumen perencanaan pembangunan desa, berita acara musyawarah, daftar hadir peserta, dokumentasi kegiatan, dan dokumen usulan pembangunan desa.

Pemanfaatan NVivo memungkinkan peneliti mengelola data wawancara secara sistematis, mengidentifikasi pola jawaban yang berulang, serta menemukan hubungan antarkonsep yang muncul dari pengalaman pemerintah desa dan masyarakat. Melalui proses pengodean, penelitian mengidentifikasi sejumlah tema yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbangdes, kehadiran masyarakat, penyampaian aspirasi, penyampaian usulan pembangunan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, respons pemerintah desa, faktor pendukung dan penghambat partisipasi, serta upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Analisis juga memperhatikan perbedaan perspektif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam melihat pelaksanaan Musrenbangdes. Dengan demikian, NVivo digunakan tidak hanya sebagai alat untuk menyimpan data, tetapi juga sebagai instrumen untuk menelusuri pola dan hubungan antartema dalam proses partisipasi masyarakat.

Analisis melalui NVivo dilakukan dalam tiga tahap pengodean, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Pada tahap open coding, peneliti membaca dan menelaah transkrip wawancara secara berulang untuk mengidentifikasi konsep-konsep awal yang muncul dari pernyataan informan. Beberapa kode awal yang ditemukan meliputi kehadiran masyarakat, keterlibatan masyarakat, penyampaian aspirasi, penyampaian usulan, pemberian pendapat, akses informasi, keterbukaan pemerintah desa, penentuan prioritas pembangunan, pengambilan keputusan, respons pemerintah, tindak lanjut usulan, kesibukan masyarakat, keterbatasan informasi, pemahaman masyarakat, faktor pendukung, serta upaya meningkatkan partisipasi. Kode-kode tersebut menggambarkan berbagai bentuk dan pengalaman masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Desa Harapan.

Pada tahap open coding, keterangan Kepala Desa Syakariah, S.Sos., menunjukkan adanya upaya pemerintah desa memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi pembangunan. Sementara itu, keterangan Sekretaris Desa Sultan, S.Sos., serta staf desa Sartika dan Hikmah memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan, penyampaian informasi, dan mekanisme pembahasan usulan dalam Musrenbangdes. Dari kelompok masyarakat, Sultan, Nasrah Kasim, dan Rahmat Wijaya memberikan perspektif mengenai pengalaman masyarakat dalam mengikuti forum, menyampaikan kebutuhan, serta menilai respons pemerintah desa. Perbedaan perspektif tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengodean karena

memungkinkan peneliti membandingkan bagaimana partisipasi masyarakat dipahami dari sisi pemerintah desa dan dari sisi masyarakat sebagai peserta Musrenbangdes.

Tahap kedua adalah axial coding, yaitu menghubungkan kode-kode awal yang memiliki keterkaitan dan mengelompokkannya ke dalam kategori yang lebih luas. Berdasarkan hasil pengelompokan, beberapa kategori utama yang terbentuk meliputi community participation, community voice, decision-making, government responsiveness, participation barriers, supporting factors, dan participation improvement. Kategori community participation mencakup kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes. Community voice mencakup penyampaian aspirasi, pendapat, dan usulan pembangunan. Decision-making berkaitan dengan proses pembahasan dan penentuan prioritas pembangunan. Government responsiveness menggambarkan respons serta tindak lanjut pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat. Sementara itu, participation barriers dan supporting factors menggambarkan berbagai kondisi yang menghambat maupun mendukung keterlibatan masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan desa.

Pada tahap axial coding, hubungan antarkategori menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kehadiran dalam Musrenbangdes, tetapi juga oleh kesempatan untuk menyampaikan suara dan keterlibatan dalam proses pembahasan pembangunan. Aspirasi masyarakat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas, tetapi realisasi usulan juga dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan, kemampuan anggaran, dan prioritas pembangunan desa. Di sisi lain, keterbukaan pemerintah desa, penyampaian informasi, dan pemberian ruang untuk menyampaikan pendapat menjadi faktor yang mendukung partisipasi. Sebaliknya, kesibukan masyarakat, keterbatasan informasi, dan perbedaan tingkat pemahaman mengenai Musrenbangdes menjadi faktor yang dapat membatasi keterlibatan masyarakat. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses yang melibatkan interaksi antara masyarakat, pemerintah desa, informasi, aspirasi, dan mekanisme pengambilan keputusan.

Tahap terakhir adalah selective coding, yaitu mengidentifikasi tema inti yang mampu mengintegrasikan seluruh kategori yang telah ditemukan. Berdasarkan hasil analisis, tema inti penelitian adalah community participation in development planning forums, yang menunjukkan bahwa Musrenbangdes menjadi ruang partisipatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan Desa Harapan. Analisis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berlangsung melalui kehadiran, penyampaian aspirasi, pemberian pendapat, dan pengajuan usulan pembangunan. Namun, tingkat partisipasi belum sepenuhnya merata karena terdapat perbedaan tingkat keaktifan masyarakat serta hambatan berupa kesibukan, keterbatasan informasi, dan pemahaman mengenai fungsi Musrenbangdes. Respons pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Secara keseluruhan, hasil analisis NVivo menunjukkan bahwa efektivitas partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes berkaitan dengan tersedianya ruang komunikasi, akses terhadap informasi, kesempatan menyampaikan aspirasi, respons pemerintah desa, dan keterlibatan masyarakat dalam pembahasan prioritas pembangunan. Partisipasi masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang hadir, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat menyampaikan suara dan usulannya dalam proses perencanaan. Pada saat yang sama, masih terdapat tantangan berupa variasi tingkat partisipasi, keterbatasan informasi, kesibukan masyarakat, serta belum meratanya pemahaman mengenai pentingnya Musrenbangdes. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi, keterbukaan informasi, pemberian ruang dialog yang lebih luas, dan peningkatan keterlibatan masyarakat menjadi aspek yang dapat mendukung partisipasi yang lebih bermakna dalam perencanaan pembangunan desa.

Dengan demikian, penggunaan NVivo 12 Pro memberikan struktur analitis yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menghubungkan berbagai temuan wawancara mengenai partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes. Proses open coding membantu menemukan konsep-konsep awal, axial coding membantu menghubungkan konsep tersebut ke dalam kategori yang lebih luas, sedangkan selective coding membantu menemukan tema inti penelitian. Hasil analisis tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes merupakan proses yang mencakup kehadiran, penyampaian aspirasi, keterlibatan dalam pembahasan, serta hubungan antara suara masyarakat dan respons pemerintah desa. Dengan pendekatan tersebut, NVivo mendukung konsistensi proses pengodean dan memberikan dasar yang lebih terstruktur dalam menjelaskan pola partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

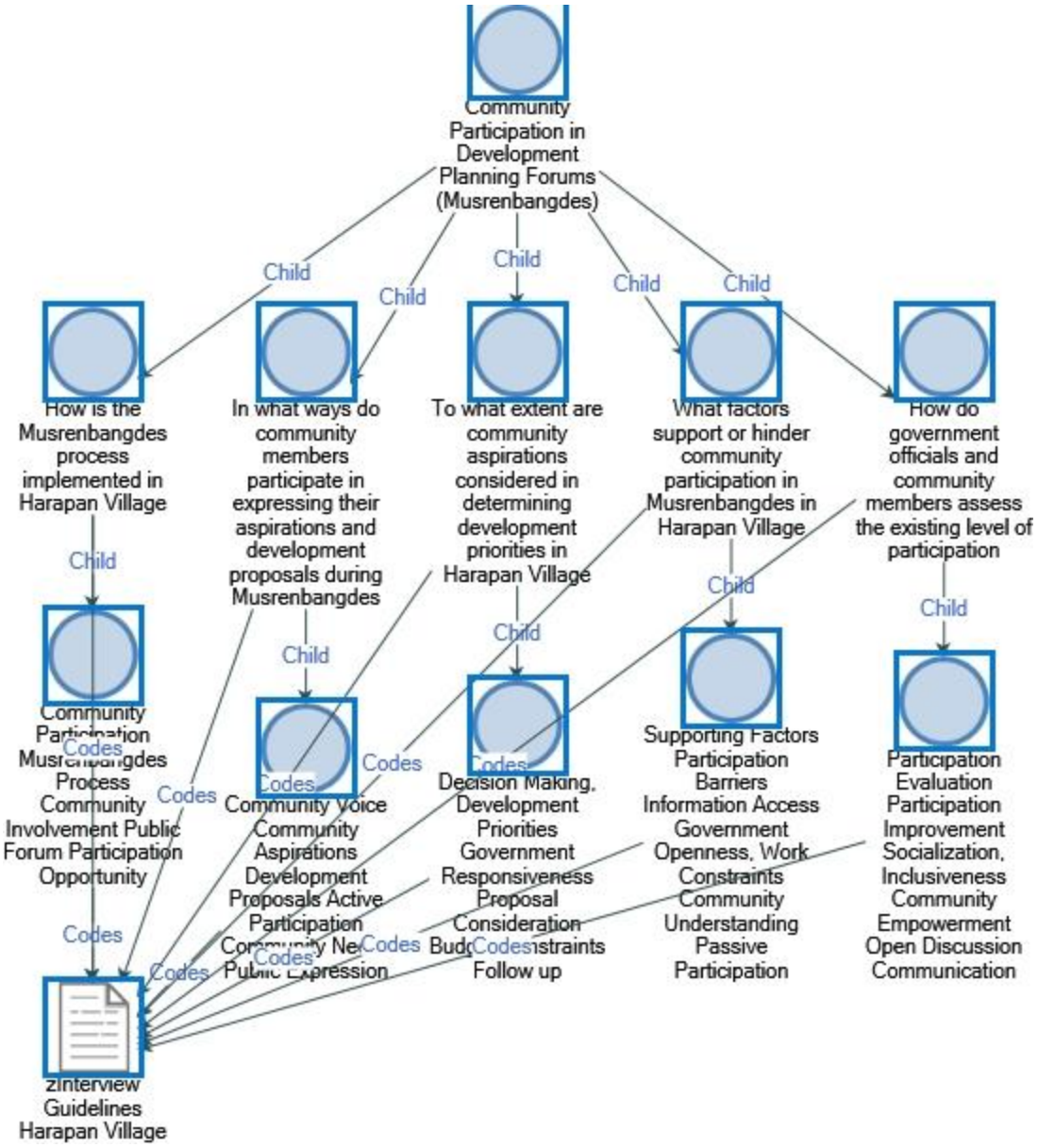

Gambar 2 Visualisasi Model Proyeksi Pengodean Peta Proyek NVivo dalam Analisis Partisipasi Masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes): Sebuah Eksplorasi Kualitatif melalui NVivo

Gambar tersebut menampilkan peta proyek atau diagram hierarki kualitatif yang dibuat menggunakan perangkat lunak NVivo dengan topik utama Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes). Diagram ini menguraikan berbagai pertanyaan penelitian dan kategori kode pendukung yang terhubung secara struktural melalui garis relasi child dan codes dari sumber data dokumen pedoman wawancara di Harapan Village.

Melalui visualisasi ini, terlihat bagaimana topik utama bercabang menjadi beberapa sub-pertanyaan penting, seperti proses pelaksanaan Musrenbangdes, bentuk partisipasi warga, pertimbangan aspirasi masyarakat, faktor pendukung atau penghambat, serta penilaian tingkat partisipasi oleh pejabat pemerintah dan anggota komunitas. Setiap cabang terhubung ke berbagai kode tematik spesifik seperti pembuatan keputusan, prioritas pembangunan, responsivitas pemerintah, hingga hambatan informasi dan pemahaman masyarakat.

Gambar 3 Visualisasi Word Cloud dari Kata-kata dengan Frekuensi Tertinggi dalam Analisis Transkrip Wawancara mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES)

Gambar tersebut menyajikan visualisasi data berupa awan kata atau word cloud yang menyoroti berbagai istilah kunci terkait partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Kata-kata seperti community, participation, village, development, dan musrenbangdes tampak dominan dengan ukuran yang lebih besar, menunjukkan frekuensi atau tingkat kepentingan yang tinggi dari konsep-konsep tersebut dalam analisis data.

Selain itu, terdapat pula berbagai kata pendukung lainnya seperti government, members, proposals, needs, dan aspirations yang memperkaya pemahaman mengenai dinamika interaksi serta aspirasi warga dalam forum musyawarah desa. Visualisasi ini secara efektif merangkum temuan kualitatif dari suatu penelitian atau analisis menggunakan perangkat lunak NVivo, yang menggambarkan keterlibatan aktif masyarakat serta peran pemerintah dalam merumuskan prioritas pembangunan

- Pembahasan

- Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbangdes di Desa Harapan menjadi ruang formal bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Partisipasi tersebut terlihat melalui kehadiran masyarakat, penyampaian aspirasi, pemberian pendapat, serta pengajuan usulan pembangunan. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran dalam forum, tetapi juga sebagai keterlibatan dalam menyampaikan kebutuhan dan gagasan pembangunan. Keterangan pemerintah desa dan masyarakat menunjukkan adanya ruang komunikasi antara kedua pihak dalam proses perencanaan. Dalam perspektif pembangunan partisipatif, kondisi tersebut penting karena masyarakat merupakan pihak yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kebutuhan dan persoalan di lingkungannya. Dengan demikian, Musrenbangdes berfungsi sebagai mekanisme untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan agenda pembangunan desa.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes belum sepenuhnya seragam. Sebagian masyarakat aktif menyampaikan pendapat dan usulan, sementara sebagian lainnya lebih banyak hadir dan mengikuti proses pembahasan tanpa menyampaikan pandangan secara langsung. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kehadiran masyarakat belum selalu menunjukkan tingkat partisipasi yang sama. Partisipasi yang lebih substantif membutuhkan kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan kebutuhan, memberikan tanggapan, dan terlibat dalam pembahasan prioritas. Oleh karena itu, keberhasilan Musrenbangdes tidak cukup diukur berdasarkan jumlah peserta yang hadir, tetapi juga berdasarkan kualitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah desa. Dalam konteks Desa Harapan, variasi tingkat keaktifan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penguatan partisipasi masyarakat.

- Aspirasi Masyarakat dan Penentuan Prioritas Pembangunan

Hasil analisis NVivo menunjukkan bahwa community voice merupakan salah satu tema penting dalam pelaksanaan Musrenbangdes. Masyarakat menggunakan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang mereka anggap penting. Penyampaian aspirasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membawa persoalan dan kebutuhan di tingkat lingkungan ke dalam agenda perencanaan desa. Dengan demikian, Musrenbangdes memiliki fungsi sebagai saluran komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat secara langsung ditetapkan menjadi program pembangunan. Aspirasi tersebut perlu dibahas dan disesuaikan dengan skala prioritas serta kemampuan sumber daya desa. Proses tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berlangsung dalam kerangka pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai kepentingan dan keterbatasan.

Dalam konteks tersebut, pemerintah desa memiliki posisi penting dalam memastikan bahwa aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian dari proses penentuan prioritas. Pemerintah desa perlu menjelaskan alasan ketika suatu usulan belum dapat direalisasikan sehingga masyarakat memahami proses dan pertimbangan yang digunakan. Transparansi mengenai prioritas dan keterbatasan anggaran dapat mencegah munculnya kesenjangan antara harapan masyarakat dan keputusan pembangunan. Temuan di Desa Harapan memperlihatkan bahwa respons pemerintah terhadap usulan masyarakat merupakan bagian penting dari kebermaknaan partisipasi. Ketika masyarakat memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjut usulannya, mereka dapat memahami bahwa partisipasi tidak selalu berarti seluruh usulan harus direalisasikan. Dengan demikian, kualitas partisipasi juga berkaitan dengan keterbukaan proses setelah masyarakat menyampaikan aspirasi.

- Respons Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat

Tema government responsiveness yang ditemukan melalui analisis NVivo menunjukkan adanya hubungan antara partisipasi masyarakat dan respons pemerintah desa. Partisipasi menjadi lebih bermakna ketika aspirasi yang disampaikan memperoleh tanggapan dari pemerintah desa. Respons tersebut dapat berupa pembahasan usulan, pemberian penjelasan, pencatatan kebutuhan, maupun tindak lanjut melalui proses perencanaan pembangunan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan mekanisme perencanaan desa. Oleh karena itu, respons pemerintah tidak hanya berkaitan dengan penerimaan usulan, tetapi juga dengan kemampuan memberikan informasi mengenai proses dan status usulan tersebut. Hubungan ini penting karena masyarakat membutuhkan kepastian informasi mengenai bagaimana aspirasi mereka diproses setelah Musrenbangdes berlangsung.

Respons pemerintah juga berpengaruh terhadap keberlanjutan keterlibatan masyarakat dalam forum perencanaan berikutnya. Apabila masyarakat memperoleh kesempatan menyampaikan pendapat dan mendapatkan penjelasan mengenai tindak lanjutnya, maka proses tersebut dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak memperoleh informasi mengenai hasil usulan, partisipasi berpotensi menjadi sekadar kegiatan formal. Dalam konteks Desa Harapan, penguatan mekanisme umpan balik menjadi penting agar masyarakat tidak hanya terlibat pada saat Musrenbangdes berlangsung, tetapi juga mengetahui perkembangan usulan setelah forum selesai. Dengan demikian, partisipasi dapat dipahami sebagai proses yang berlangsung dari tahap penyampaian aspirasi sampai pada tahap tindak lanjut perencanaan pembangunan.

- Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi

Analisis NVivo juga menunjukkan adanya faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat. Keterbukaan pemerintah desa, penyampaian informasi, kesempatan berbicara, dan adanya kebutuhan pembangunan menjadi faktor yang mendukung keterlibatan masyarakat.

Informasi yang diberikan sebelum pelaksanaan Musrenbangdes memungkinkan masyarakat mengetahui waktu, tempat, tujuan, dan ruang partisipasi yang tersedia. Selain itu, suasana musyawarah yang terbuka dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi tidak hanya bergantung pada kemauan masyarakat, tetapi juga pada kondisi kelembagaan yang disediakan oleh pemerintah desa. Semakin jelas ruang dan mekanisme partisipasi, semakin memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan.

Di sisi lain, penelitian menemukan beberapa hambatan, terutama kesibukan masyarakat, keterbatasan informasi, dan perbedaan pemahaman mengenai fungsi Musrenbangdes. Masyarakat yang memiliki pekerjaan atau aktivitas lain dapat mengalami kesulitan untuk menghadiri forum. Selain itu, sebagian masyarakat mungkin belum memahami bahwa Musrenbangdes merupakan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan ikut membahas kebutuhan pembangunan. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan forum. Pemerintah desa juga perlu memperkuat sosialisasi dan komunikasi sebelum pelaksanaan Musrenbangdes. Dengan demikian, masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai dan dapat mempersiapkan aspirasi yang akan disampaikan.

- Partisipasi Bermakna dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Temuan penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Harapan telah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, tetapi masih terdapat ruang untuk memperkuat kualitas keterlibatan tersebut. Partisipasi bermakna tidak hanya ditunjukkan melalui kehadiran, tetapi juga melalui kemampuan masyarakat untuk menyampaikan suara, memengaruhi pembahasan, memperoleh informasi, dan mengetahui tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan. Dalam konteks ini, Musrenbangdes dapat dipandang sebagai arena interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menentukan kebutuhan pembangunan. Hasil analisis NVivo memperlihatkan hubungan antara community participation, community voice, decision-making, dan government responsiveness sebagai tema yang saling berkaitan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa kualitas partisipasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah desa membuka ruang dialog dan merespons aspirasi masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan partisipasi masyarakat di Desa Harapan dapat diarahkan pada peningkatan akses informasi, sosialisasi sebelum Musrenbangdes, perluasan kesempatan berbicara, serta penguatan mekanisme umpan balik terhadap usulan masyarakat. Pemerintah desa dapat memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang cukup mengenai agenda dan proses Musrenbangdes sehingga mereka dapat mempersiapkan usulan secara lebih baik. Selain itu, hasil pembahasan dan status usulan perlu dikomunikasikan kembali kepada masyarakat agar proses perencanaan dapat dipahami secara transparan. Pendekatan tersebut dapat membantu menghubungkan partisipasi masyarakat dengan proses pengambilan

keputusan secara lebih jelas. Dengan demikian, Musrenbangdes tidak hanya menjadi forum penyampaian usulan, tetapi juga menjadi mekanisme dialog antara pemerintah desa dan masyarakat dalam membentuk prioritas pembangunan.

- Sintesis Pembahasan

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Harapan merupakan proses yang melibatkan kehadiran, penyampaian aspirasi, pembahasan kebutuhan, respons pemerintah, dan tindak lanjut perencanaan. Analisis NVivo membantu memperlihatkan keterkaitan antara berbagai aspek tersebut secara sistematis. Community participation menjadi tema utama yang berhubungan dengan community voice dan decision-making, sementara government responsiveness menjadi elemen yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan proses perencanaan pembangunan. Pada saat yang sama, participation barriers menunjukkan bahwa partisipasi masih dipengaruhi oleh faktor waktu, informasi, dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, penguatan partisipasi membutuhkan dukungan dari sisi masyarakat sekaligus pemerintah desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas Musrenbangdes sangat berkaitan dengan kemampuan forum tersebut menciptakan ruang komunikasi yang terbuka dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara substantif dalam perencanaan pembangunan Desa Harapan.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

- Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, berlangsung melalui penyampaian aspirasi, pemberian usulan pembangunan, dan keterlibatan dalam proses pembahasan prioritas pembangunan. Hasil analisis menggunakan NVivo menunjukkan adanya keterkaitan antara community participation, community voice, decision-making, dan government responsiveness. Masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan, sementara pemerintah desa berperan dalam menampung, membahas, dan mempertimbangkan aspirasi tersebut dalam proses perencanaan. Namun, tingkat keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya merata karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, pemahaman terhadap proses perencanaan, serta keterwakilan masyarakat dalam forum Musrenbangdes.

Partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Keterbukaan pemerintah desa, komunikasi yang baik, dan tersedianya kesempatan untuk menyampaikan aspirasi menjadi faktor yang mendukung keterlibatan masyarakat. Sebaliknya, keterbatasan akses informasi dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, penguatan partisipasi tidak hanya

berkaitan dengan kehadiran masyarakat dalam forum, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara bermakna dan memperoleh respons dari pemerintah desa. Analisis berbantuan NVivo membantu mengidentifikasi pola tersebut secara sistematis melalui pengelompokan kode dan tema penelitian.

- Saran

Pemerintah Desa Harapan disarankan untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan penyebaran informasi sebelum pelaksanaan Musrenbangdes agar masyarakat memahami tujuan, mekanisme, serta tahapan perencanaan pembangunan desa. Informasi mengenai usulan pembangunan, kriteria penentuan prioritas, dan hasil Musrenbangdes juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa dapat memperluas ruang partisipasi dengan melibatkan kelompok masyarakat yang selama ini belum terwakili secara optimal sehingga proses perencanaan dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat secara lebih luas.

Masyarakat juga perlu meningkatkan keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan, tidak hanya dengan menghadiri Musrenbangdes tetapi juga dengan mempersiapkan dan menyampaikan aspirasi berdasarkan kebutuhan nyata di lingkungan masing-masing. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi dan jumlah informan serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan data kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat dan kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Athaya, N., Mardianto, M., & Rafinzar, R. (2024). Implementation of good governance in village development planning in Ogan Ilir Regency. *Natapraja: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, 12*(1). https://doi.org/10.21831/natapraja.v12i1.68330

Hadawiya, R. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat* [Skripsi, Universitas Medan Area].

Nadhiro, R. A., & Choiriyah, I. U. (2024). Community participation in village development planning. *Indonesian Journal of Public Policy Review, 25*(1). https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1366

Nasir, N. (2026). Efektivitas partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa: Studi kasus di Desa Bulogading, Kecamatan Bontonompo,

Kabupaten Gowa. *Jurnal Dialektika Politik, 10*(1), 50–64. https://doi.org/10.37949/jdp.v10i1.290

Nuraedah, N., Kapile, C., Nurvita, N., Mutawakkil, M., & Ahmad, I. (2025). Increasing community participation in village development planning through participatory approaches and community education. *International Journal of Community Care of Humanity, 3*(1).

Oktafiana, D., Afrizal, A., & Charin, R. O. P. (2025). Implementation of village Musrenbang in improving development in Kelong Village, Bintan Regency in 2024. *Interdisciplinary Journal of Global and Multidisciplinary, 2*(1).

Sihaloho, J. T. B., Panjaitan, M., Pasaribu, J., & Tobing, A. L. (2025). Strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa. *[Nama jurnal perlu disesuaikan dengan metadata artikel asli]*, 11(3).

Syifana, A., Halim, A., & Lestari, S. F. (2026). Formal vs informal: Public participation in village government development planning in Indonesia—Evidence from Bumiwangi Village. *Journal of Accounting and Investment, 27*(1), 130–146. https://doi.org/10.18196/jai.v27i1.28082

Syukri, M. (2023). Gender policies of the new developmental state: The case of Indonesian new participatory village governance. *Journal of Current Southeast Asian Affairs, 42*(1), 110–133. https://doi.org/10.1177/18681034221149750

Taurista, H., & Choiriyah, I. U. (2024). Community participation in development planning is driven by leadership, communication, and education. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 15*(3). https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1080

Tupen, D. L., Adzzahra, F. C., Dewi, I. A. K., Fatkhuri, F., & Pertiwi, G. (2025). Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam mewujudkan pembangunan partisipatif: Studi di Kabupaten Sleman. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 7*(2).

Utami, D. A., & Machdum, S. V. (2021). Partisipasi masyarakat dan peran pendamping dalam pemberdayaan kelompok masyarakat melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Jurnal Pembangunan Manusia, 2(2).